

**PERANAN CAMAT DALAM PEMBANGUNAN  
MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN  
MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Universitas 45 Makassar

Oleh :

Abdul Saleh

4598021034

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**

2002



**HALAMAN PENERIMAAN**

Pada hari ini, Rabu 12 Juni 2002

Skripsi dengan judul : **Peranan Camat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa Di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara**

Nama : Abdul Saleh  
Nomor Pokok : 45 98 021 034  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 45 Makassar, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara (S1) dalam jurusan Ilmu Administrasi program studi Ilmu Administrasi Negara.



Dr. Andi Jaya Sose, SE, MBA  
Rektor Universitas 45

**PENGAWAS UMUM**



Dr. Husain Hamka, MS  
Dekan Fisipol Univ. 45

**PANITIA UJIAN**

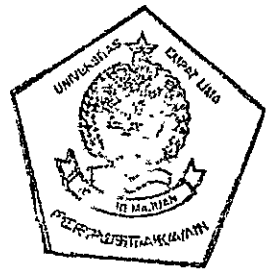
Dra. Hj. Nurmi Nonci, M.Si  
Ketua

Drs. Marten D. Palobo, M.Si  
Sekretaris

**TIM PENGUJI**

- 1. Drs. Husain Hamka, MS
- 2. Drs. H. Baharuddin, M.Si
- 3. Dra. Hj. Nurmi Nonci, M.Si
- 4. Dra. Juharni, M.Si

(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)



## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peranan Camat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa Di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara

Nama : Abdul Saleh

STB : 45 98 021 034

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Administrasi Negara

MENYETUJUI

Pembimbing I

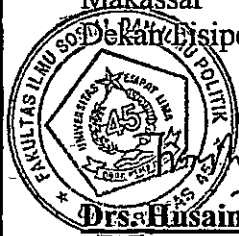
Dra. Hj. Nurmi Nonci, M.Si

Pembimbing II

Dra. Nurkaidah, MM

MENGESAHKAN

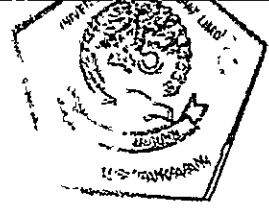
Makassar  
Dekan Disipol Univ. 45



Drs. Husain Hamka, MS

Ketua Jurusan  
Administrasi Negara

Drs. Marthen D. Palobo, M.Si

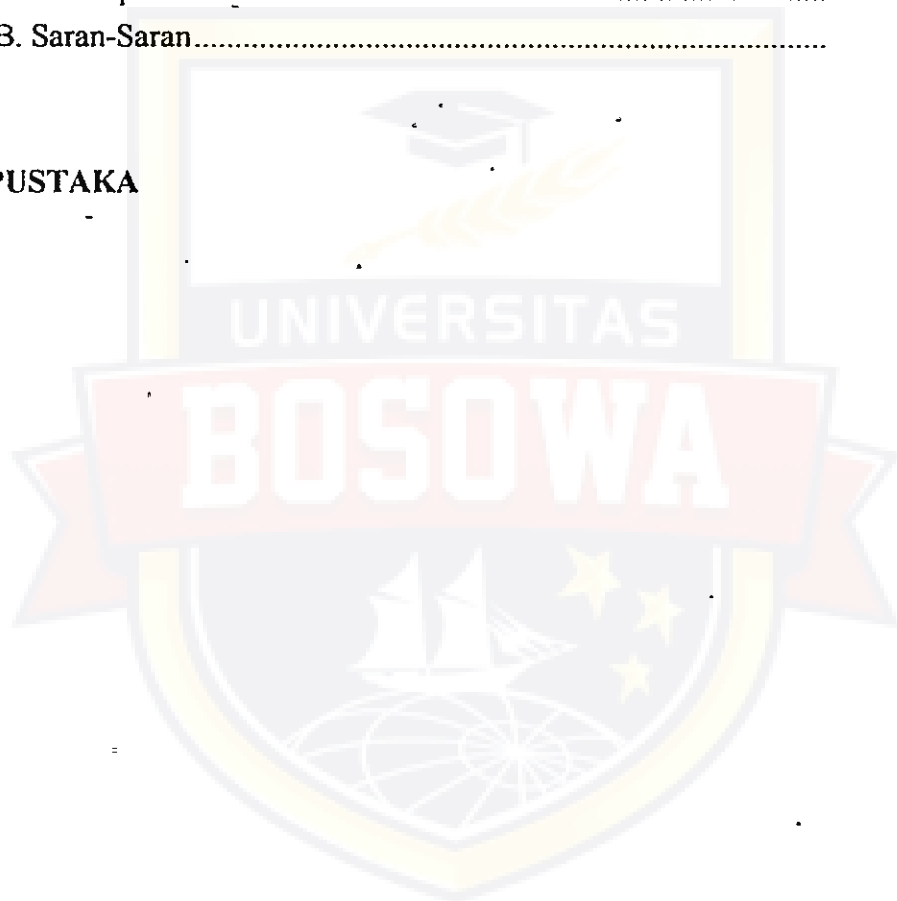


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENERIMAAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
<b>Bab I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>Bab II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Beberapa Pengertian.....	12
B. Kepemimpinan Camat .....	16
C. Dasar dan Tujuan Program Pembangunan .....	19
D. Pembangunan Transportasi .....	20
<b>Bab III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Berdirinya Kecamatan Mappedeceng .....	26
B. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Mappedeceng.....	29
C. Uraian Tugas dan Tata Kerja Camat .....	31

<b>Bab IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
	A. Peranan Camat Pada Tahap Perencanaan Pembangunan.....	40
	B. Peranan Camat Pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan.....	47
	C. Peranan Camat Dalam Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	52
	D. Peranan Camat Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan	57
<b>Bab V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan .....	64
	B. Saran-Saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA**




## KATA PENGANTAR

Pertama-tama menulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunianya atas diri penulis sehingga skripsi ini dapat terwujud.

Penulisan skripsi ini adalah dengan dasar pertimbangan ilmiah sebagai realita dari acuan pikiran penulis selama menempah diri di bangku kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 45 Makassar.

Hadirnya skripsi ini adalah berkat usaha maksimal penulis serta bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu sewajarnya bila pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama kepada yang terhormat :

1. DR. Andi Jaya Sose, SE, MBA, selaku Rektor Universitas 45 Makassar.
2. Bapak Drs. Husain Hamka, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 45 Makassar.
3. Bapak Drs. Marten D. Palobo' selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 45 Makassar.
4. Ibu Dra. Hj. Normi Nonci, M.Si dan Ibu Dra. Nurkaidah, MM sebagai pembimbing pertama dan kedua yang telah banyak meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan memberikan petunjuk sampai selesainya skripsi ini.
5. Bapak Kepala Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara beserta seluruh Pegawai yang telah memberikan izin dan membantu dalam pengumpulan data-data yang sehubungan dengan kebutuhan skripsi ini.

- 
6. Bapak Dosen/Ibu Dosen dan Staf Administrasi yang telah mendidik, membina, memberi arahan dan petunjuk serta pelayanan yang prima selama di bangku kuliah sampai selesai.
  7. Sembah sujud penulis haturkan kepada Ayahanda H. Makkasau dan Ibunda Hj. Nujariah (Almarhuma) yang tak henti-hentinya mendidik, membiayai, membesarkan, mendoakan, dan memberi dorongan sampai selesainya pendidikan saya sampai pada Tingkat Perguruan Tinggi.
  8. Semua keluarga dan teman-teman kerabat di kampus yang telah membantu selama di bangku kuliah.

Atas bantuan dan dorongan di atas penulis tidak sanggup untuk membalasnya kecuali memohonkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memberikan pahala yang setimpal dengan amal perbuatan mereka.

Disadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan di sana sini, oleh karena itu dengan penuh lapang dada akan menerima semua bentuk kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna bagi diri penulis, almamater, bangsa dan negara.

Makassar, Mei 2002

*Penulis,*



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Wilayah dan Distribusi Penduduk Kecamatan Mappedeceng Kab Luwu .....	27
Tabel 2	Jumlah dan Jabatan Pegawai Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara .....	28
Tabel 3	Tanggapan Tentang Perhatian Camat Terhadap Peningkatan Jalan Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng .....	41
Tabel 4	Tanggapan Responden Tentang Penyuluhan Peningkatan Jalan Yang Dilaksanakan Oleh Camat .....	42
Tabel 5	Tanggapan Responden Tentang Kehadiran Camat Dalam Rapat Penyusunan Rencana Pembangunan Peningkatan Jalan Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng .....	44
Tabel 6	Tanggapan Responden Tentang Perhatian Camat membuat Usulan Pembangunan Jalan Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng .....	45
Tabel 7	Tanggapan Responden Tentang Realisasi usulan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng .....	46
Tabel 8	Tanggapan Responden Tentang Kehadiran Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan Jalan Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng .....	48
Tabel 9	Tanggapan Responden Tentang Strategi Pelaksanaan Peningkatan Jalan Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng .....	49
Tabel 10	Tanggapan Responden Tentang Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan Jalan Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng .....	50
Tabel 11	Tanggapan Responden Tentang Ketepatan Setiap Pembangunan Jalan Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng .....	51
Table 12	Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Jalan Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng .....	53

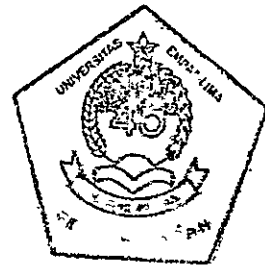




Tabel 13	Tanggapan Responden Tentang Kehadiran Camat Dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Jalan Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng .....	54
Tabel 14	Tanggapan Responden Tentang Ketepatan Rapat Koordinasi yang Dilaksanakan Oleh Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng .....	55
Tabel 15	Tanggapan Responden Tentang Kelengkapan Peserta Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan Jalan Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng .....	56
Tabel 16	Tanggapan Responden Tentang Kedatangan Camat Dalam Pelaksanaan Peningkatan Jalan Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng .....	58
Tabel 17	Tanggapan Responden Tentang Kesesuaian Rencana dan Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng .....	59
Tabel 18	Tanggapan Responden Tentang Kelancaran Pelaksanaan Pengawasan Dalam Pelaksanaan Peningkatan Jalan Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng .....	60
Tabel 19	Tanggapan Responden Tentang Kedisiplinan Camat Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Peningkatan Jalan Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng .....	61
Tabel 20	Tanggapan Responden Tentang Manfaat Pembangunan Peningkatan Jalan Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng .....	62
Tabel 21	Tanggapan Responden Tentang Efektifitas Setiap Pembangunan Peningkatan Jalan Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng .....	62

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan sekarang ini merupakan proses sosial dan ekonomi yang berlangsung secara terus menerus yang ingin dicapai ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dengan azas adil dan merata. Artinya, bahwa hasil-hasil baik material maupun spritual harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka dibutuhkan pemerintahan yang kuat dan mampu menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat Indonesia.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah biasanya dituangkan dalam mekanisme proyek-proyek pembangunan. Proyek-proyek pembangunan harus termuat dengan jelas tujuannya (Obyektive), sasaran yang akan dicapai (target), cara mengukur keberhasilannya (performance evaluation), jangka waktu pelaksanaannya, cara melaksanakan, kebijakan untuk menjamin proyek itu dapat dilaksanakan, biaya serta tenaga yang diperlukan dan badan yang akan melaksanakannya.

Apabila proyek itu merupakan bagian dari kegiatan yang lebih besar, biasanya disebut program, harus jelas keterkaitan proyek dengan tujuan dan sasaran program, serta dengan proyek-proyek lain yang berada dalam program

yang sama. Dalam pelaksanaannya, proyek dapat dilakukan sendiri oleh badan pemerintah, baik oleh pemilik proyek maupun badan pemerintah lain, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam hal ada otonomi. Untuk itu perlu ada mobilisasi tenaga serta kesiapan lembaga pemerintah yang akan melaksanakannya.

Proyek dapat pula dilaksanakan oleh badan lain di luar pemerintah, biasanya perusahaan swasta, baik asing maupun dalam negeri atau campuran. Badan tersebut dapat ditunjuk langsung atau dapat dipilih melalui pelelangan. Pelelangan biasanya merupakan cara terbaik, karena dalam pelelangan ada persaingan yang sehat yang menguntungkan baik secara teknis maupun dari segi biaya. Selain itu, pengadaan barang dan jasa untuk proyek pembangunan ini merupakan baik yang peka dan rawan terhadap tindakan-tindakan penyelewengan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan keterbukaan dan kebertanggungjawaban diperlukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan, pemborosan dan kebocoran.

Ketersediaan data/informasi yang lengkap dan akurat sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, bahkan menjadi modal pokok dalam perencanaan, sehingga perlu dikelola secara baik. Untuk itu keberadaan system informasi yang andal menjadi kebutuhan mutlak dalam pelaksanaan pembangunan dan berperan dalam strategi pembangunan masyarakat desa.

Banyaknya kegiatan pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah, setidaknya pada tahap awal pembangunan yang paling utama ialah pembangunan prasarana dasar, baik prasarana ekonomi maupun sosial. Prasarana ekonomi meliputi perhubungan dan prasarana jalan, energi irigasi, dan sebagainya. Prasarana sosial meliputi prasarana pendidikan seperti sekolah, dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit. Disamping prasarana fisik, pemerintah juga perlu memperhatikan pembangunan lembaga-lembaga sosial, baik lembaga politik, hukum, budaya maupun ekonomi.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus perhatian adalah peranan camat dalam pembangunan prasarana jalan di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Pembangunan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan adalah merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat sebagai administrator pembangunan di wilayahnya. Camat hendaknya memelihara terlaksananya pembangunan masyarakat desa, fisik maupun non fisik dan menjalankan roda pemerintahan yang mempunyai disiplin tinggi, berwibawa dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas-tugas yang diemban oleh seorang camat terutama dalam hal pelaksanaan pembangunan di masyarakat desa dan hambatan-hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa di Kecamatan Mappedeceng, maka dibutuhkan peranan seorang

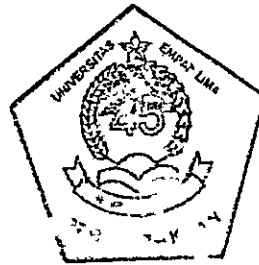
camat yang mempunyai jiwa untuk membangun masyarakatnya dalam hal ini masyarakat Kecamatan Mappedeceng yang sehat fisik, mental demi tercapainya masyarakat adil, makmur dan merata, dan pemerintah yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta bertaqwa terhadap Allah SWT sesuai dengan tujuan cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam UUD 1945.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan sebelumnya, serta luasnya permasalahan, maka penulis membatasinya pada peranan camat dalam pembangunan masyarakat desa yang dilaksanakan di Kecamatan Mappedeceng.

Sehubungan batasan masalah di atas, maka berikut ini akan dikemukakan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana peranan camat dalam perencanaan pembangunan prasarana jalan di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara ?
2. Bagaimana peranan camat dalam pelaksanaan pembangunan prasarana jalan di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara ?
3. Bagaimana peranan camat dalam koordinasi pembangunan prasarana jalan di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara ?
4. Bagaimana peranan camat dalam pengawasan pembangunan prasarana jalan di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara ?



## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan penelitian.

- a. Untuk mengetahui sejauhmana peranan camat dalam perencanaan pembangunan prasarana jalan di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.
- b. Untuk mengetahui sejauhmana peranan camat dalam pelaksanaan pembangunan prasarana jalan di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.
- c. Untuk mengetahui sejauhmana peranan camat dalam koordinasi pembangunan prasarana jalan di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.
- d. Untuk mengetahui sejauhmana peranan camat dalam pengawasan pembangunan prasarana jalan di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

### 2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi aparat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pembangunan prasarana jalan di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat Kantor Kecamatan Mappedeceng dalam memecahkan masalah dan hambatan yang dihadapi.

- c. Diharapkan dapat berguna sebagai referensi di perpustakaan oleh mahasiswa yang akan membahas masalah atau meneliti masalah yang sama yang mendukung dan sebagai bahan bacaan mahasiswa.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Pada dasarnya perencanaan pembangunan merupakan dasar dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan nasional maupun perkotaan, khususnya pembangunan di Kecamatan Mapedeceng Kabupaten Luwu Utara. Mengenai penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara diserahkan pada salah satu seksi, yaitu seksi pembangunan merupakan bagian dari struktur organisasi pada Kantor Bupati Luwu Utara, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 668/V/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Wilayah Kabupaten Luwu Utara.

Peranan camat dalam pembangunan adalah merupakan manajer pembangunan. Oleh karena itu camat selaku manajer pembangunan wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, koordinator, dan evaluator pembangunan. Dari sudut pandang ini penulis sangat tertarik untuk mengkaji, meneliti dan mengevaluasi lebih dalam betapa pentingnya : "Peranan Camat dalam pembangunan prasarana jalan di pedesaan khususnya di tingkat kecamatan" yang ditetapkan sebagai judul skripsi.

Salah satu segi pentingnya proses perencanaan adalah pelaksanaannya dan untuk itu diperlukan suatu administratif negara yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut. Perencanaan penyempurnaan administratif negara dan pembinaan sistem administratif untuk turut mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, perlu direncanakan bagian integral dari perencanaan pembangunan itu sendiri.

Dalam tahap penyusunan perencanaan diharapkan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam perencanaan sebab pada saat penyusunan perencanaan akan menentukan langkah selanjutnya dalam merealisasikan perencanaan tersebut. Keterlibatan semua pihak dalam kegiatan ini, akan membawa dampak tersendiri jika tidak didasarkan pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Karena sasaran yang ingin dicapai adalah bagaimana pelaksanaan daripada perencanaan pembangunan tersebut dikerjakan untuk waktu yang akan datang.

Program atau pelaksanaan pembangunan prasarana jalan masing-masing bidang atau sektor terdiri dari berbagai program pembangunan yang harus dilaksanakan. Program pembangunan jalan ini terdiri dari proyek-proyek pembangunan yang merupakan unit terkecil dari proyek-proyek pembangunan yang merupakan unit terkecil daripada aktivitas investasi yang harus diperhitungkan dalam proses perencanaan.

Menyadari keterbatasan ini dikaitkan dengan kemampuan di daerah menyediakan anggaran daripada pendapatan daerah, maka untuk membantu kesulitan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat memberikan bantuan proyek



pembangunan jalan khususnya pada pemerintah daerah tingkat II melalui program Inpres bantuan pembangunan jalan di daerah tingkat II.

Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di daerah, melibatkan berbagai instansi terkait. Dengan demikian pemerintah setempat harus berperan aktif dalam mengkoordinasikan pembangunan dengan instansi-instansi terkait.

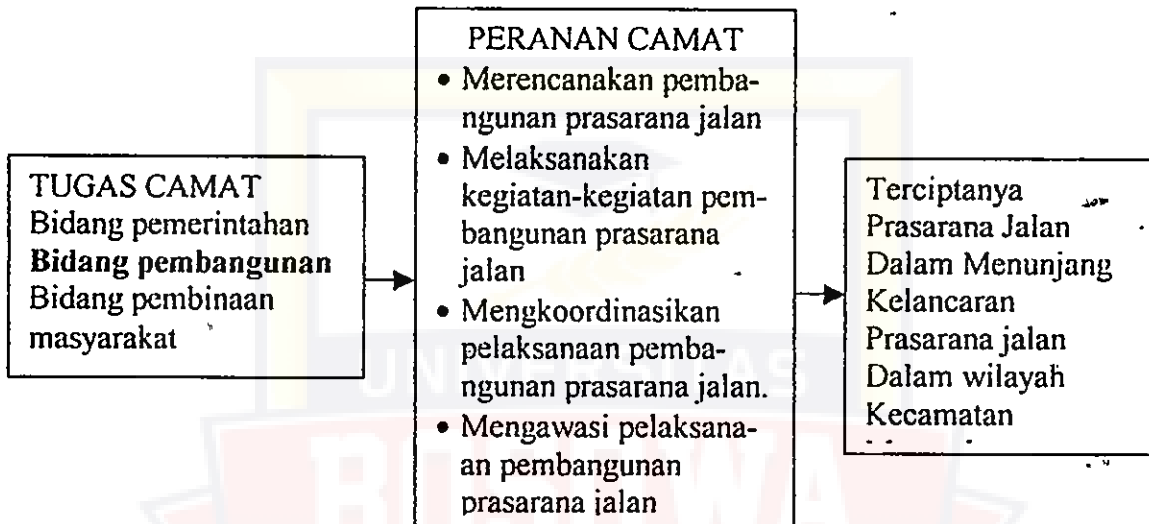
Untuk mencegah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan maka diperlukan pengawasan dari suatu instansi. Oleh karena itu camat sebagai manajer pembangunan di tingkat kecamatan perlu memainkan peran aktif untuk melaksanakan pengawasan setiap proyek yang dilaksanakan di daerahnya agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat tercapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian suatu proyek atau pembangunan sangat dipengaruhi oleh dan tergantung pada :

1. Baik tidaknya perencanaan
2. Masalah teknik yang menyangkut pelaksanaan kegiatan proyek tersebut.
3. Koordinasi antar lembaga yang terkait dalam pelaksanaan proyek tersebut.
4. Pelaksanaan pengawasan yang sungguh-sungguh
5. Faktor ekstern yang mempengaruhi kegiatan proyek.
6. Manajer proyek dan tenaga yang digunakan dalam pelaksanaan proyek.

Untuk lebih jelasnya penulis menggambarkan kerangka konseptual dalam bentuk bagan sebagai berikut :

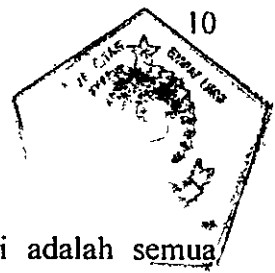
#### BAGAN KERANGKA KONSEPTUAL



#### D. Metode Penelitian

##### 1. Tipe dan Jenis Penelitian

- a. Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan ini adalah survei yang dimaksudkan untuk bertujuan memperoleh gambaran yang jelas dari obyek permasalahan yang diteliti.
- b. Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan ini adalah penyusunan deskriptif, maksudnya untuk memberikan gambaran peranan camat dalam pembangunan masyarakat desa di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.



## 2. Populasi dan Sampel

- a. Populasi; yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai pada kantor Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara sebanyak 10 orang (tidak termasuk camat) ditambah dengan Kepala Desa dan Sekdes yang ada dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng sebanyak 30 orang
- b. Sampel; berhubung jumlah populasi penelitian ini tidak cukup 100 orang, maka Teknik Sampel yang dipergunakan adalah sample jenuh artinya semua populasi dijadikan sebagai anggota sampel/responden sebanyak 40 orang.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Yaitu penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti untuk memperoleh data dan tanggapan responden.

### b. Interview

Yaitu mengadakan wawancara langsung terhadap responden mengenai bagaimana peran camat dalam pembangunan masyarakat desa di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

### c. Kuesioner

Pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan kepada pegawai kantor Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

#### 4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh melalui kuesioner dideskripsikan secara sederhana dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Data kuantitatif yang ada dalam tabel akan dianalisis secara kualitatif yang dipadukan dengan hasil observasi dan wawancara untuk diperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti.

#### E. Sistematika Pembahasan

Penyusunan ini terdiri dari 5 bab dan kelima bab tersebut dibagi dalam beberapa sub-sub yang terdiri :

Bab I yaitu Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu tinjauan pustaka yang membahas tentang beberapa pengertian, Dasar dan Tujuan Program Pembangunan, Pembangunan Prasarana jalan, dan Kepemimpinan Camat dalam pembangunan masyarakat desa di Kecamatan Mappedeceng.

Bab III berisi tentang Sejarah Singkat Berdirinya Kecamatan Mappedeceng, Struktur organisasi, dan Tata Kerja masing-masing bagian.

Bab IV membahas tentang peranan camat dalam pembangunan masyarakat desa dan factor-faktor yang menghambat camat dalam pembangunan masyarakat desa.

Bab V berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Beberapa Pengertian

Untuk memberikan pemahaman terhadap judul ini, maka penulis mengemukakan beberapa definisi yang digunakan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pembaca.

##### 1. Pengertian Peranan Camat

Peranan dapat diartikan sebagai sesuatu yang amat penting. Bila, seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya berarti ia menjalankan suatu peranan.

Drs. Surjono Sukamto dalam bukunya *Penyempurnaan Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional* mengemukakan bahwa “*Peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status sesuatu*” (1985 : 237)

Dari definisi di atas maka jelaslah bahwa peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status orang-orang tertentu dalam menjalankan tugasnya

Sebelum memasuki pengertian pokok tentang camat, maka penulis terlebih dahulu memberikan landasan pelaksanaan pemerintahan daerah yang menjadi sumber kekuatan hukum pemerintahan daerah adalah berdasarkan UUD 1945 pasal 18 yaitu mengatakan bahwa :

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dibagi atas daerah besar dan kecil, baik yang bersifat otonom, maupun yang bersifat administratif.

Oleh karena itu, dalam rangka melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dalam rangka pembinaan kestabilan politik serta kesatuan bangsa, maka diperlukan hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara Republik Indonesia, diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah demi perkembangan dan pembangunan daerah yang adil, makmur dan merata.

Sebagai realisasi penyelenggaraan otonomi daerah, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang otonomi daerah No. 22 tahun 1999, UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah dan peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.

Menurut keputusan Bupati Luwu Utara nomor 243 tahun 2001 kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah. Sedangkan camat adalah kepala kecamatan yang bertugas membantu bupati dalam kedudukannya selaku perangkat daerah kabupaten.

Jadi berdasarkan pengertian di atas, maka peranan camat adalah membantu bupati dalam kedudukannya selaku perangkat daerah kabupaten yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

## 2. Pengertian Pembangunan

Pada tahap awal pembangunan, peranan pemerintah sangat besar. Kegiatan pembangunan sebagian besar adalah usaha pemerintah. Bahkan di negara yang menganut paham sosialisme yang murni, seluruh kegiatan pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah.

Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya "Pengantar Administrasi Pembangunan (1974 : 25) mengatakan bahwa : *Pembangunan adalah suatu usaha perubahan dari suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan tertentu kepada suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik* (1974 : 25).

Jelaslah bahwa yang dimaksud pembangunan di sini adalah suatu usaha mengadakan perubahan dari yang tidak baik menjadi baik dan dari keadaan yang baik menjadi lebih baik lagi.

## 3. Pengertian Masyarakat

Sebelum penulis menuju kepada pengertian masyarakat, maka penulis terlebih dahulu membahas mengenai hidup bermasyarakat. Di dalam hidup

bermasyarakat kita harus mengerti apa yang disebut hidup bermasyarakat, karena hidup bermasyarakat adalah suatu kehidupan sekelompok manusia yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lain.



Salah satu kehidupan manusia yang bersifat umum adalah manusia pada dasarnya mempunyai sifat egois, oleh sebab itu manusia baru dapat dikatakan manusia apabila ia dapat hidup dikelilingnya bersama dengan manusia lainnya sehingga makhluk hidup yang mempunyai perasaan sosial.

Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas soal hidup bermasyarakat, maksudnya yang diselidiki selalu obyeknya ialah masyarakat.

Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi dalam bukunya Sosiologi Pendidikan oleh Drs. Ary H. Gunawan mengatakan bahwa : *Masyarakat adalah hubungan antara kekuatan-kekuatan dari bentuk masyarakat dan dengan kehidupan individu*" (2000 : 4).

Dari kedua definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah tempat orang-orang hidup bersama yang merupakan kekuatan dari bentuk masyarakat yang menghasilkan kebudayaan

## 5. Pengertian Desa

Apa yang dimaksud desa, atau lebih tegas lagi definisi desa. Berhasil atau gagalnya suatu pembangunan di desa akan dipengaruhi oleh sikap masyarakat desa.

Prof. Bintarto dalam bukunya "Sosiologi Kota dan Desa" oleh Drs Supri Imam Asy'ari mengatakan bahwa : "*Desa adalah suatu kesatuan*



*hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri” (1999 ; 94).*

Selanjutnya definisi desa menurut Prof. Drs. R. Bintarto yang dikutip oleh Drs. I. Nyoman Beratha dalam bukunya “Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa mengatakan sebagai berikut :

“Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomi, politis dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain” (1982 : 26).

Jadi jelaslah bahwa desa merupakan perwujudan geografis dan juga merupakan satu kesatuan hukum, sosial ekonomi, politik dan kultural di mana bertempat tinggal masyarakat untuk mengadakan interaksi dengan daerah-daerah lain dan mengadakan pemerintahan sendiri.

## **B. Kepemimpinan Camat**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam membimbing, menuntun dan mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kehendaknya dan bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan pada Pasal 2 Angka (1) disebutkan bahwa “Camat adalah Kepala pemerintahan Kecamatan yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota/madya”.

Selanjutnya pada Pasal 3 disebutkan bahwa :

Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal, antar instansi vertikal lainnya dalam wilayah kecamatan.

Arti lain daripada Camat dan Kecamatan dikemukakan oleh Nordholt dalam Sadu (1991 : 2), bahwa, kajian tentang Kecamatan berarti mencakup 3 (tiga) lingkungan kerja :

1. Kecamatan berarti Kantor Camat.
2. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti Camat sebagai kepalanya.
3. Camat sebagai “pengetua Wilayahnya”.

Sebagai kepala wilayah, maka seorang Camat mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Membina ketentraman dan ketertiban diwilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan ketentraman serta ketertiban yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Menyelenggarakan koordinasi atas semua kegiatan instansi-instansi vertikal, dan antara instansi vertikal dan dinas daerah.

4. Mengusahakan secara terus menerus agar segala peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah dijalankan oleh instansi-instansi yang terdapat di daerah serta pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk itu serta mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
5. Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang dengan atau berdasar peraturan perundang-undangan yang diberikan kepadanya.
6. Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi lain.

Selain itu, membahas tentang kepemimpinan Camat tentunya akan dihadapkan dengan kepemimpinan pemerintah di Indonesia khususnya kepemimpinan di tingkat Kecamatan, sebagaimana yang dikemukakan oleh S. Pamudji (1995 : 1), bahwa *"kepemimpinan pemerintah di Indonesia adalah salah satu jenis kepemimpinan di bidang pemerintahan atau kepemimpinan yang dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintahan"*.

Berkaitan dengan itu maka kepemimpinan Camat dapat dipandang sebagai suatu kemampuan kepala pemerintah Kecamatan dalam membimbing, menuntun dan mempengaruhi bawahannya untuk bekerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya.

meningkatkan mutu lingkungan hidup dan serasi dengan lingkungan proyek-proyek lain di daerah yang bersangkutan

Adanya bantuan proyek pembangunan jalan tersebut tidaklah berarti bahwa pemerintah setempat bebas menggunakannya atau dengan kata lain tidak sepenuhnya bantuan tersebut diserahkan kepada daerah tingkat II di dalam hal penentuan sasarannya, akan tetapi untuk ketetapan pencapaian tujuannya serta kemanfaatannya. Olehnya itu dalam menggunakan atau penggunaan bantuan sasaran, pemerintah daerah tingkat II diberikan pengarahannya secara umum dari pemerintah pusat.

Program ini selain bertujuan untuk memperluas dan menciptakan lapangan kerja, juga karena program ini adalah melaksanakan program pembangunan jalan proyek-proyek pada tingkat Kabupaten/Kotamadya daerah tingkat II, maka dengan demikian program ini menunjang pelaksanaan rencana pembangunan di tingkat Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II Luwu Utara.

#### **D. Pembangunan Transportasi**

Pembangunan pada dasarnya adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh rakyat menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut pemerintah Orde Baru sejak Rancangan Pembangunan Lima Tahun (REPELITA I) sampai

pada (REPELITA ) V telah menggalakkan program pembangunan di berbagai bidang kehidupan bangsa, baik politik , ekonomi, sosial budaya dan pertahanan. Usaha tersebut dimaksudkan agar program pembangunan dapat terlaksana secara merata dan dirasakan di seluruh wilayah tanah air.



Pembangunan pada wilayah daerah merupakan salah satu pusat perhatian.

Hal ini tentu saja didasari oleh suatu pemikiran bahwa pembangunan adalah suatu yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintah. Tugas ini merupakan usaha pemerintah untuk mewujudkan pembangunan bangsa menuju kepada cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan pada dasarnya akan selalu diartikan dan dikaitkan dengan suatu aktivitas dan interaksi sosial untuk mencapai tujuan dalam arti kemajuan atau peningkatan baik fisik maupun spritual.

Sondang P. Siagian, mengemukakan pengertian pembangunan sebagai berikut :

“Pembangunan adalah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation Building)” (1981 : 2 – 3).

Sedangkan menurut Bintarto, (1994 : 25) mengemukakan pengertian pembangunan sebagai berikut : “Pembangunan merupakan suatu proses

perubahan yang kontinyu dan terus menerus dari suatu keadaan yang dianggap lebih baik”.

Berdasarkan kedua defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses yang terus menerus dilakukan oleh suatu bangsa secara berencana untuk memperbaiki tata kehidupan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

Jelaslah, bahwa yang dimaksud dengan pembangunan di sini adalah suatu usaha mengadakan pertumbuhan dan perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, dari keadaan yang baik diusahakan akan menjadi lebih baik lagi.

Dengan melihat pengertian atau perumusan pembangunan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Pembangunan merupakan proses yang berarti suatu kegiatan terus menerus dilaksanakan.
2. Pembangunan merupakan usaha yang sadar dilaksanakan.
3. Pembangunan dilaksanakan secara berencana dan perencanaan berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.
4. Pembangunan mengarah kepada modernisasi adalah cara hidup yang baru yang lebih baik dari pada sebelumnya.
5. Modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi dimensional atau mencakup seluruh aspek kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa pembangunan merupakan pembaharuan suatu masyarakat, dan dilaksanakan secara sadar bersama-sama sebagai bangsa dan sebagai negara dan berorientasi pada pembangunan dan pertumbuhan ke arah pembaharuan yang sesuai dengan kepribadian bangsa menuju cita-cita bersama ialah masyarakat adil dan makmur.

Dengan memperhatikan kedua defenisi tersebut di atas, maka bagi penulis sendiri, defenisi pembangunan itu dapat dirumuskan sebagai “segenap usaha perubahan, pertumbuhan dan pemerataan yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata”. Rumusan ini didasarkan pada Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang terkandung di dalam falsafah Pancasila.

Dan rumusan terakhir ini kalau dianalisis secara mendalam, maka ada tiga hal pokok yang menonjol, yaitu :

1. Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan terhadap struktur dan pola kehidupan, misalnya usaha untuk mengubah struktur perekonomian yang berdasarkan pada pertanian ke arah struktur perekonomian yang berdasarkan pada industri. Termasuk dalam proses perubahan ini adalah perubahan sikap dan pola berpikir yang tradisional menjadi sikap dan pola sikap dan pola berpikir yang maju.
2. Pembangunan adalah suatu pertumbuhan, yang berarti bahwa perubahan-perubahan sosial yang telah ada atau akan dilakukan itu harus membawa

akibat adanya pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai kehidupan bangsa.

3. Pembangunan harus mengandung aspek pemerataan, ini berarti bahwa pembangunan tidak hanya ditujukan kepada kepentingan segelintir orang, tetapi hasilnya harus dapat dibagi secara merata kepada seluruh rakyat sesuai dengan nilai pengabdianya terhadap pembangunan tersebut. Aspek pemerataan ini tercermin dalam Trilogi Pembangunan, yaitu dalam aspek yang pertama, yakni : "Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat".

Jelaslah, bahwa aspek pemerataan merupakan salah satu aspek daripada pembangunan nasional.

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) No. II/MPR.1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), bahwa :

"Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan damai"(1988 : 45).

Kalau tujuan daripada pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan sekarang ini, maka pada dasarnya searah dan sesuai dengan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perkataan lain, bahwa masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia sejak



perjuangan kemerdekaan sampai pada saat ini, hanya akan dapat diwujudkan dengan adanya kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Tanpa usaha tersebut, harapan dan cita-cita masyarakat adil dan makmur itu akan menjadi suatu impian belaka. Masyarakat adil dan makmur tidak begitu saja turun dari langit, akan tetapi memerlukan dan kerja keras dari seluruh rakyat Indonesia di bawah pimpinan pemerintah bersama aparaturnya.



### BAB III

## GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN



### A. Sejarah Singkat Berdirinya Kecamatan Mappedeceng

Pada dasarnya suatu wilayah dibentuk dalam suatu kesatuan administratif didasarkan atas kebutuhan daerah sebagai bentuk penanganan berbagai macam masalah daerah tersebut. Secara umum, daerah yang luas wilayahnya akan mengalami kesulitan dan kewalahan dalam melayani masyarakat.

Hal itulah yang menyebabkan adanya pemekaran wilayah kecamatan yang luas menjadi kecamatan perwakilan. Kecamatan Mappedeceng merupakan pemekaran dari kecamatan Masamba pada tahun 1993 yang kini menjadi Ibukota Kabupaten Luwu Utara. Peresmian kecamatan perwakilan Mappedeceng menjadi kecamatan definitif pada tanggal 28 Mei 2001 oleh Bupati Luwu Utara M. Luthfi. A. Mutty.

Jarak kantor Kecamatan Mappedeceng dengan Ibukota Kabupaten Luwu Utara (Masamba) yaitu 12 Km, sedangkan jarak kantor Kecamatan Mappedeceng dengan jalan trans Sulawesi yaitu 7 km. Luas Kecamatan Mappedeceng 275,50 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 18,988 jiwa yang terbagi dalam 15 desa.

Kemudian untuk lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Kebudayaan masyarakat Kecamatan Mappedeceng sangat majemuk karena terdiri dari berbagai suku yaitu Bugis Makassar, Jawa, Toraja, Bali, Sunda dan Lombok.

Agama yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Mappedeceng adalah Agama Islam, Kristen, hindu, tetapi mayoritas beragama Islam. Walaupun masyarakat Kecamatan Mappedeceng bermacam suku dan agama namun mereka tetap memelihara kerukunan antara pemeluk agama dan mempunyai sifat gotong royong yang masih kental dalam lingkungannya. Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Mappedeceng mulai dari yang buta huruf, tamat SD, SMP, SMU dan perguruan tinggi yang ada di kota propinsi serta di luar propinsi.

Adapun jumlah pegawai yang bekerja pada Kantor Kecamatan Mappedeceng adalah 11 personil yaitu :

Tabel 2  
Jumlah dan Jabatan Pegawai Kecamatan Mappedeceng  
Kabupaten Luwu Utara

Nomor	N a m a	J a b a t a n
1	Drs. Matoy Andi Baso	C a m a t
2	Sudarmin, SSTP	Sekretaris camat
3	Chieruddin Mada	Kasi Pemberdayaan masyarakat
4	Aming	Bendahara Rutin
5	Farida	Bendahara Barang
6	Ny. Ludia. P	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
7	Drs. Baso Rahmat	Petugas Penyuluh Lapangan KB (PPLKB)
8	Aldin	Unit Pengelola Pendapatan Daerah
9	Darmayanti	Unit Pengelola Pendapatan Daerah
10	Asmi Arsad	Unit Pengelola Pendapatan Daerah
11	Nengah Sudarna	Unit Pengelola Pendapatan Daerah

Sumber : Kantor Kecamatan Mappedeceng, 2002

## **B. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Mappedeceng**

Sebelum memberikan pembahasan tentang struktur organisasi kantor Kecamatan Mappedeceng, maka terlebih dahulu penulis memberikan definisi struktur organisasi.

“Struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi (Drs. Malayu S.P. Hasibuan, 1996 : 131).

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa struktur organisasi merupakan bagian terpenting dalam suatu organisasi, karena struktur organisasi menggambarkan wewenang dan wilayah tugas berdasarkan jabatannya. Dengan wewenang tersebut, maka personil-personil sebagai bagian dari struktur organisasi mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya.

Struktur organisasi sangat bermanfaat dalam pencapaian kesuksesan tugas dan pembatasan wilayah kerja masing-masing bagian dalam organisasi. Wilayah kerja antara satu bagian dengan bagian lain tidak berhak untuk dicampuri, sebab telah jelas pembagian menurut struktur organisasi.

Dengan dibentuknya struktur organisasi akan memberikan batasan tentang pihak yang menjadi pimpinan atau bawahan dalam suatu organisasi. Untuk lebih jelasnya berikut ini digambarkan struktur organisasi kantor Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut :

### C. Uraian Tugas dan Tata Kerja Camat

Struktur organisasi sangat penting, namun uraian tugas tidak kalah pentingnya.

Uraian tugas bermanfaat untuk memberikan penjelasan tugas masing-masing jabatan yang telah dijelaskan dalam struktur organisasi.

1. **Camat** mempunyai tugas menyusun rencana, memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kecamatan dalam melaksanakan sebahagian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada uraian (1) di atas adalah :

- a. Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman
- b. Memberi petunjuk dan arahan kepada sekretaris, seksi dan bawahan lainnya agar pelaksanaan tugas sesuai tujuan yang hendak dicapai.
- c. Membagi tugas kepada sekretaris, seksi dan bawahan lainnya sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.
- d. Menilai hasil kerja sekretaris, kepala seksi dan bawahan lainnya dengan cara mengevaluasi pelaksanaan tugas.
- e. Menilai prestasi kerja sekretaris, kepala seksi dan bawahan lainnya untuk pembinaan karier.
- f. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati.

- g. Menetapkan kebijakan yang dilimpahkan kepada lurah.
- h. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas kelurahan dan desa.
- i. Melakukan koordinasi atas kegiatan perangkat daerah lainnya dengan instansi vertikal dalam wilayah kecamatan.
- j. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban dengan koordinasi aparat keamanan yang terkait dalam wilayah kecamatan.
- k. Melakukan pembinaan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lintas kelurahan dan desa.
- l. Melakukan pembinaan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan desa meliputi perekonomian, pertanian, perindustrian, koperasi dan penataan lingkungan berdasarkan kondisi dan potensi wilayah.
- m. Melakukan pengurusan kelancaran produksi barang dan jasa publik.
- n. Melakukan pembinaan kesejahteraan sosial kemasyarakatan meliputi pembinaan keagamaan, pendidikan, ketarampilan masyarakat, kesehatan masyarakat dan sarana sosial kemasyarakatan lainnya.
- o. Mengkaji dan menyusun strategi pembangunan di segala bidang secara berkesinambungan dengan melibatkan seluruh tokoh masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

- p. Melaksanakan tugas sebagai pejabat pembuat akta tanah dan mengupayakan penyelesaian segala permasalahan pertanahan dengan mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait.
- q. Melakukan pembinaan kebersihan dan keindahan dan pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat.
- r. Melaksanakan pembinaan administrasi bidang umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- s. Melakukan pendataan pemetaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah serta sumber lainnya dalam rangka peningkatan PAD.
- t. Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan gerakan peduli kecamatan.
- u. Memberi saran alternatif kepada bupati untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- v. Membuat laporan pelaksanaan tugas
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. **Sekretariat Kecamatan**, mempunyai tugas menyusun rencana, melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan yang meliputi administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan membuat laporan pelaksanaan tugas.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada uraian (2) di atas adalah :

- a. Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman.

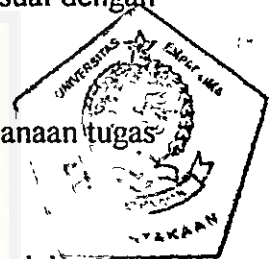
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugasnya.
- c. Memberi petunjuk kepada agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas.
- e. Menilai prestasi kerja bawahan untuk pembinaan karir.
- f. Melaksanakan dan mengelola manajemen kesekretariatan kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- g. Melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan dan administrasi umum.
- h. Memberikan layanan teknis administrasi kepada camat, seksi-seksi dan seluruh staf.
- i. Menginventarisasi, mengelola dan mengevaluasi data baik pemerintahan, pembangunan dan masyarakat serta informasi untuk pembinaan penyelenggaraan tugas umum, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pembangunan, pembangunan dan masyarakat.
- j. Memberikan saran alternatif kepada camat untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- k. Membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- l. Mengkoordinasikan tugas seksi-seksi agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



3. **Seksi Perangkat Bawahan dan Otonomi Desa** mempunyai tugas menyusun rencana penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan dan pemerintahan desa serta membuat laporan pelaksanaan tugas.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada uraian (3) di atas adalah :

- a. Menyusun rencana dan pedoman kerja sebagai pedoman.
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas.
- e. Menilai hasil kerja bawahan untuk pembinaan karier.
- f. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dengan koordinasi instansi terkait.
- g. Mempersiapkan bahan dan data untuk pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan peningkatan partisipasi politik masyarakat lintas kelurahan dan desa.
- h. Mempersiapkan bahan dan data setiap organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat lainnya.
- i. Mempersiapkan bahan dan data untuk penyelenggaraan pemilihan umum (PEMILU).
- j. Melaksanakan pembinaan keagrariaan dan tertib pertanahan.
- k. Memberikan saran alternatif kepada camat untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



- l. Membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**4. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa/Kelurahan** mempunyai tugas menyusun rencana melaksanakan pembinaan pembangunan, pembinaan kesejahteraan sosial, sarana dan prasarana pelayanan umum, perekonomian, produksi, distribusi, serta pembinaan lingkungan hidup.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada uraian (4) di atas adalah :

- a. Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman.
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas.
- e. Menilai prestasi kerja bawahan untuk pembinaan karier.
- f. Merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan pelayanan kesejahteraan sosial dan bantuan lintas kelurahan dan desa.
- g. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum bagi masyarakat.

- h. Merencanakan dan menyusun serta mengevaluasi program pelaksanaan kegiatan perekonomian masyarakat serta peningkatan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana lintas kelurahan dan desa.

## 5. Seksi Pelayanan Umum

Seksi pelayanan umum mempunyai tugas menyusun rencana, melaksanakan unsur pelayanan umum yang meliputi inventarisasi kekayaan kecamatan, kelurahan dan desa, kebersihan, perizinan, sarana dan prasarana umum serta membuat laporan pelaksanaan tugas :

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada uraian (5) di atas adalah :

- a. Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman.
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas.
- e. Menilai hasil kerja bawahan untuk pembinaan karir.
- f. Melaksanakan pembinaan kegiatan inventarisasi kekayaan kecamatan, kelurahan dan desa.
- g. Menyelenggarakan pembinaan penyuluhan kebersihan lingkungan kepada masyarakat.

- h. Merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi pembinaan kegiatan penataan keindahan lingkungan dan pertamanan serta sanitasi lingkungan.
  - i. Merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi pembinaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana umum masyarakat.
  - j. Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana publik yang diperlukan oleh masyarakat.
  - k. Menyelenggarakan penyediaan dan kelancaran pelayanan jasa-jasa publik yang diperlukan oleh masyarakat.
  - l. Melaksanakan kegiatan administrasi dan pelayanan di bidang perizinan dan rekomendasi lainnya pada masyarakat.
  - m. Memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat dengan mensosialisasikan setiap kebijakan pemerintah.
  - n. Memberikan saran alternatif kepada camat untuk pelaksanaan tugas.
  - o. Membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  - p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
6. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- a. Kelompok jabatan fungsional dimaksud pada bagian 6 ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- b. Setiap kelompok tersebut pada ayat (a) bagian ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati.
- c. Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (a) bagian ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis jenjang jabatan fungsional pada bagian (a) bagian ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja..



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Suksesnya pembangunan di pedesaan sangat ditentukan oleh peranan setiap pemimpin khususnya camat sebagai kepala wilayah dan kepala pemerintahan. Pelaksanaan kepemimpinan pada dasarnya mengalir dari atas ke bawah atau dari atasan ke bawahan, demikian pula dengan di Kantor Camat Mappedeceng, dalam hal ini pemegang kepemimpinan tertinggi adalah camat yang selanjutnya secara berjenjang turun pada jenjang selanjutnya yang ada di bawahnya sampai pada tingkat yang terendah.

Adapun peranan camat dalam pembangunan pedesaan yang akan diuraikan sebagaimana telah dikemukakan terdahulu yang dibatasi pada 4 (empat) tahap pelaksanaan pembangunan yaitu : tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, koordinasi dan pelaksanaan pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut telah diperoleh data mengenai pelaksanaan peranan Camat Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara yang diuraikan berdasarkan tahap-tahap pelaksanaan pembangunan berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dikomfirmasikan dengan hasil wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Mappedeceng yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini:

#### **A. Peranan Camat Dalam Tahap Perencanaan**

Pembangunan pedesaan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kemandirian bangsa

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan responden diungkapkan bahwa banyaknya responden yang menyatakan bahwa rendahnya perhatian camat terhadap pembangunan dan peningkatan jalan di daerahnya karena selama camat (1999 – sekarang) belum ada yang jelas pembangunan jalan yang dilaksanakannya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pedesaan, maka salah faktor yang menentukan adalah sarana dan prasarana jalan. Oleh karena itu seorang camat sebagai kepala pemerintahan dan pembangunan seharusnya tidak hanya aktif di bidang pembangunan politik tetapi sebaiknya lebih aktif di bidang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Kemudian untuk mengetahui pelaksanaan penyuluhan pembangunan dan peningkatan jalan dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng disajikan pada tabel 4.

Tabel 4

Tanggapan Responden Tentang Penyuluhan Peningkatan Jalan Yang Dilaksanakan Oleh Camat

NO.	JAWABAN RESPONDEN	F	%	KET.
1	Sering	3	7,5	
2	Kadang-kadang	7	17,5	
3	Jarang	13	32,5	
4	Tidak pernah	17	42,5	
	JUMLAH	40	100	

Sumber : Data primer 2002

Data Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 40 responden ada 17 (42,5 %) yang mengatakan bahwa "tidak pernah" camat melaksanakan penyuluhan tentang

Tabel 5

Tanggapan Responden Tentang Kehadiran Camat Dalam Rapat  
Penyusunan Rencana Pembangunan Peningkatan Jalan  
Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng

NO.	JAWABAN RESPONDEN	F	%	KET.
1	Sering	15	37,5	
2	Kadang-kadang	12	30	
3	Jarang	8	20	
4	Tidak pernah	5	12,5	
	JUMLAH	40	100	

Sumber : Data primer 2002

Data Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 40 responden ada 15 (37,5 %) yang mengatakan bahwa “sering” camat menghadiri rapat penyusunan rencana pembangunan peningkatan jalan dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng, dan 12 ( 30 %) yang berpendapat bahwa camat “kadang-kadang” menghadiri rapat perencanaan pembangunan dan peningkatan jalan. Kemudian 8 (20 %) yang berpendapat bahwa “jarang” camat menghadiri rapat perencanaan pembangunan dan peningkatan jalan, dan 5 (12,5 %) yang berpendapat bahwa camat “tidak pernah” menghadiri rapat perencanaan pembangunan dan peningkatan jalan dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng.

Tingginya frekuensi responden yang mengatakan bahwa camat jarang hadir dalam rapat penyusunan perencanaan pembangunan jalan karena rapat itu dilaksanakan pada tingkat desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan LKMD setempat. Jadi memang Pak camat tidak perlu hadir pada rapat penyusunan rencana pembangunan jalan jika rapat itu dilaksanakan di tingkat desa.



Untuk mengetahui bagaimana realisasi usulan pembangunan prasarana jalan di wilayah Kecamatan Mappedeceng disajikan pada tabel 7.

Tabel 7

Tanggapan Responden Tentang Realisasi Usulan pembangunan dan Peningkatan Jalan Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng

NO.	JAWABAN RESPONDEN	F	%	KET.
1	Sering direalisasikan	4	10	
2	Kadang-kadang	15	37,5	
3	Jarang direalisasikan	17	42,5	
4	Tidak pernah	4	10	
	JUMLAH	40	100	

Sumber : Data primer 2002

Data Tabel 7 menunjukkan bahwa dari 40 responden ada 17 (42,5 %) yang mengatakan bahwa usulan pembangunan dan peningkatan jalan dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng “jarang direalisasikan”, dan 15 ( 37,5 %) yang berpendapat bahwa usulan camat tentang pembangunan dan peningkatan jalan “kadang-kadang direalisasikan”. Kemudian masing-masing 4 (10 %) yang berpendapat bahwa usulan camat tentang pembangunan dan peningkatan jalan “sering direalisasikan” dan “tidak pernah direalisasikan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden diungkapkan bahwa setiap tahunnya pembangunan jalan di Kecamatan Mappedeceng tergolong cukup banyak, namun karena Kecamatan Mappedeceng cukup luas dan memiliki banyak desa, sehingga kadang-kadang ada desa tidak mendapat prioritas pembangunan jalan. Apalagi desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng termasuk desa-desa baru yaitu hasil pemekaran pada tahun 2000 dan masih tergolong desa swadaya bahkan ada desa masih berstatus desa persiapan.

dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng “sering” dilaksanakan oleh camat, dan 11 ( 27,5 %) yang berpendapat bahwa “kadang-kadang” camat melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng. Kemudian 9 (22,5 %) yang berpendapat bahwa “jarang” camat melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan, dalam rangka perbaikan prasarana jalan dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden diungkapkan bahwa apabila camat tidak menghadiri rapat koordinasi jika beliau ada urusan yang lebih penting di tingkat Kabupaten yang bersamaan waktunya dengan rapat koordinasi tersebut. Tetapi apabila camat berhalangan , maka selalu ia menunjuk seorang/sekretarisnya untuk menggantikan beliau.

Kemudian untuk mengetahui kehadiran camat dalam rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng disajikan pada tabel 13.

Tabel 13

Tanggapan Responden Tentang Kehadiran Camat Dalam  
Rapat Koordinasi Peningkatan Jalan Dalam  
Wilayah Kecamatan Mappedeceng

NO.	JAWABAN RESPONDEN	F	%	KET.
1	Sering	20	50	
2	Kadang-kadang	16	40	
3	Jarang.	3	7,5	
4	Tidak pernah	1	2,5	
	JUMLAH	40	100	

Sumber : Data primer 2002

Data Tabel 14 menunjukkan bahwa dari 40 responden ada 24 (60 %) yang mengatakan bahwa pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan dan peningkatan jalan dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng sudah “tepat”, dan 15 ( 37,5 %) yang berpendapat bahwa pelaksanaan rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng tergolong “kurang tepat”. Kemudian 1 (2,5 %) yang berpendapat bahwa rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng tergolong “sangat tepat”.

Kemudian untuk mengetahui kelengkapan peserta rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng disajikan pada tabel 15.

Tabel 15

Tanggapan Responden Tentang Kelengkapan Peserta Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan Jalan Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng

NO.	JAWABAN RESPONDEN	F	%	KET.
1	Sangat lengkap	1	2,5	
2	Lengkap	16	40	
3	Kurang lengkap	23	57,5	
4	Sangat kurang	-	-	
	JUMLAH	40	100	

Sumber : Data primer 2002

Data Tabel 15 menunjukkan bahwa dari 40 responden ada 23 (57,5 %) yang mengatakan bahwa dalam rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan dan

peningkatan jalan dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng pesertanya tergolong “kurang lengkap”, dan 16 ( 40 %) berpendapat bahwa dalam rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng pesertanya tergolong “lengkap”. Kemudian 1 (2,5 %) yang berpendapat bahwa dalam rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng pesertanya tergolong “sangat lengkap”.

Jika diperhatikan peranan camat dalam koordinasi pembangunan prasarana jalan dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng sudah tergolong cukup, namun masih ada beberapa hal yang dianggap kurang. Hal itu tidak dapat dihindari karena volume kerja seorang camat yang sudah cukup pada, sehingga kadang-kadang memang sudah sangat sukar diatur, sehingga pasti ada hal-hal yang menghalangi untuk semua dilaksanakan dengan baik dan sempurna.

#### **D. Peranan Camat Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Jalan**

Pengertian pengawasan pada umumnya adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan, pemborosan-pemborosan, dan kegagalan-kegagalan dalam mencapai tujuan.

Sasaran pengawasan adalah untuk dapat mewujudkan efisiensi, efektivitas, penghematan dan ketertiban dalam pelaksanaan pengawasan, dimana dari hasil

Data Tabel 16 menunjukkan bahwa dari 40 responden ada 20 (50 %) yang mengatakan bahwa Camat “kadang-kadang” datang melaksanakan pengawasan pada pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng, dan 10 (25 %) yang berpendapat bahwa Camat “sering” datang melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng. Kemudian 10 (25 %) yang berpendapat bahwa Camat “jarang” datang dalam melaksanakan pengawasan pada pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng.

Kemudian untuk mengetahui kesesuaian rencana dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng disajikan pada tabel 17.

Tabel 17

Tanggapan Responden Tentang Kesesuaian Rencana dan Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng

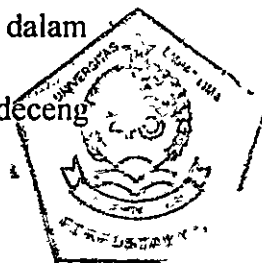
NO.	JAWABAN RESPONDEN	F	%	KET.
1	Sangat sesuai	2	5	
2	Sesuai	22	55	
3	Kurang sesuai	15	37,5	
4	Sangat kurang sesuai	1	2,5	
	JUMLAH	40	100	

Sumber : Data primer 2002

Data Tabel 17 menunjukkan bahwa dari 40 responden ada 22 (55 %) yang mengatakan bahwa pelaksanaan pengawasan pembangunan dan peningkatan jalan dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng sudah “sesuai dengan rencana”, dan 15 (

( 35 %) yang berpendapat bahwa pelaksanaan pengawasan pembangunan dan peningkatan jalan dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng tergolong “lancar”.

Kemudian 3 (7,5 %) yang berpendapat bahwa pelaksanaan pengawasan dalam pembangunan dan peningkatan jalan dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng tergolong “sangat kurang lancar”.



Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden dan tokoh masyarakat diungkapkan bahwa kurang lancarnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh camat disebabkan oleh beberapa hal antara lain : jauhnya lokasi pembangunan jalan yang dilaksanakan dan sangat sukar dijangkau kendaraan roda empat, dan padatnya tugas-tugas camat sebagai kepala pemerintahan.

Kemudian untuk mengetahui kedisiplinan camat melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng disajikan pada tabel 19.

Tabel 19

Tanggapan Responden Tentang Kedisiplinan Camat Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Peningkatan Jalan Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng

NO.	JAWABAN RESPONDEN	F	%	KET.
1	Sangat disiplin	3	7,5	
2	Disiplin	18	45	
3	Kurang disiplin	16	40	
4	Sangat kurang disiplin	3	7,5	
	JUMLAH	40	100	

Sumber : Data primer 2002

Data Tabel 19 menunjukkan bahwa dari 40 responden ada 18 (45 %) yang mengatakan bahwa camat melaksanakan pengawasan pembangunan dan peningkatan jalan dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng sudah tergolong “disiplin”, dan 16 ( 40 %) yang berpendapat bahwa camat melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng tergolong “kurang disiplin”. Kemudian masing-masing 3 (7,5 %) yang berpendapat bahwa camat melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng tergolong “sangat disiplin” dan “sangat kurang disiplin”.

Kemudian untuk mengetahui manfaat setiap pembangunan dan peningkatan jalan dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng disajikan pada tabel 20.

Tabel 20

Tanggapan Responden Tentang Manfaat Pembangunan Peningkatan Jalan Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng

NO.	JAWABAN RESPONDEN	F	%	KET.
1	Sangat bermanfaat	20	50	
2	Bermanfaat	14	35	
3	Kurang bermanfaat	6	15	
4	Sangat kurang bermanfaat	-	-	
	JUMLAH	40	100	

Sumber : Data primer 2002

Data Tabel 20 menunjukkan bahwa dari 40 responden ada 20 (50 %) yang mengatakan bahwa pembangunan dan peningkatan jalan dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng hasilnya tergolong “sangat bermanfaat”, dan 14 ( 35 %) yang berpendapat bahwa pembangunan dan peningkatan jalan dalam Wilayah

Kecamatan Mappedeceng hasilnya tergolong “bermanfaat”. Kemudian 6 (15 %) yang berpendapat bahwa pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng hasilnya tergolong “kurang bermanfaat”.

Kemudian untuk mengetahui efektivitas setiap pembangunan dan peningkatan jalan dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng disajikan pada tabel 13.

Tabel 21

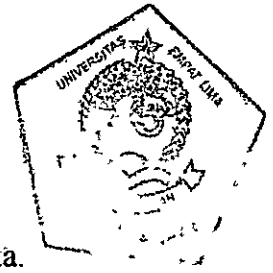
Tanggapan Responden Tentang Efektivitas Setiap Pembangunan Peningkatan Jalan Dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng

NO.	JAWABAN RESPONDEN	F	%	KET.
1	Sangat mengefektifkan	18	45	
2	Menegefektifkan	13	32,5	
3	Kurang mengefektifkan	8	20	
4	Sangat kurang mengefektifkan	1	2,5	
	JUMLAH	40	100	

Sumber : Data primer 2002

Data Tabel 21 menunjukkan bahwa dari 40 responden ada 18 (45 %) yang mengatakan bahwa pembangunan dan peningkatan jalan dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng hasilnya sudah tergolong “sangat efektif”, dan 13 (32,5 %) yang berpendapat bahwa pembangunan dan peningkatan jalan dalam Wilayah Kecamatan Mappedeceng hasilnya tergolong “efektif”. Kemudian 8 (20 %) yang berpendapat bahwa pembangunan dan peningkatan jalan dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng hasilnya tergolong “kurang efektif”, dan 1 (2,5 %) yang berpendapat bahwa pembangunan dan peningkatan jalan dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng hasilnya tergolong “sangat kurang efektif”.





## DAFTAR PUSTAKA

- Ary H. Gunawan; 2000; *Sosisologi Pendidikan*; PT. Ridha Cipta, Jakarta.
- Bintoro Tjokroamidjojo; 1974; *Pengantar Administrasi Pembangunan*; CV. Gunung Agung, Jakarta.
- Cholid Marbuku dan H. Abu Achmadi; 1999; *Metodologi Penelitian*; PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Ginandjar Kartasasmita; 1997; *Administrasi Pembangunan*; LP3ES, Jakarta.
- I Nyoman Bratha; 1982; *Desa , Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*; Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Malayu SP. Hasibuan; 1996; *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*; PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Musanef; 1991; *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Gunung Agung, Jakarta.
- Miftah Thoha; 1987; *Perspektif Perilaku Birokrasi*; CV. Rajawali, Jakarta.
- Moekijat; 1995; *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia*; Haji Masagung, Jakarta.
- Nawawi, Hadari, 1989., *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Erlangga, Jakarta.
- , 1990, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nitisemito, S. Alex. 1982., *Manajemen Personalia (Manajemen Sumber Daya Manusia)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pamuji. S. 1982., *Kepemimpinan dan Pemerintahan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- ; 1987; *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*; Bina Aksara, Jakarta

- Poerwadarminta. W.J.S. 1980., *Kamus Umum Bahasa Indonesia PN*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sadu; 1991; *Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Camat*; Aksara Baru, Jakarta.
- Sondang P. Siagian; 1981; *Filsafat Pembangunan* ; Gunung Agung, Jakarta.
- Surjono Sukanto; 1985; *Penyempurnaan Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*; Offset Alumni, Bandung.
- Sugiyono; 1999; *Metode Penelitian Administrasi*; Alfabeta, Bandung.
- Supari Imam Asy'ari; 1993; *Sosiologi Kota Dan Desa*; Usaha Nasional, Surabaya.
- Suryadi. A; 1969; *Pembangunan Masyarakat Desa*; Offset Alumni, Bandung.
- Widjaja, A.W. 1987., *Pola Kepemimpinan dan Kepemimpinan Pancasila*. Armico, Bandung.

#### **Peraturan dan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandamen 1999; Aneka Ilmu Semarang
- Undang-Undang Otonomi Daerah dan Juklat; 1999; Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya 1987.
- *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*; Sinar Grafika, Jakarta
- *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.*
- *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1993 Tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Kecamatan. Depdagri-Rl, Jakarta*

- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 03 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Dalam Wilayah Jkabupaten Luwu Utara.
- Keputusan Bupati Luwu Utara No. 227 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas Pemerintah Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara.
- Keputusan Bupati Luwu Utara No. 243 Tahun 2001 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara.

